

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang potensial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Pengembangan kesempatan kerja merupakan salah satu sasaran pembangunan suatu daerah. Penciptaan kesempatan kerja juga merupakan implikasi dari masalah meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja dari tahun ke tahunnya.

Penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dan produktif serta memberikan imbalan layak merupakan sarana mencapai cita-cita pembangunan ekonomi suatu daerah. Diantara itu adanya kebijaksanaan dalam tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan serta pembagian penghasilan yang merata, akan berakibat peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan disemua daerah pada dasarnya ditujukan untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan secara lebih adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi tidak hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta mempertinggi tingkat kesejahteraan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan salah satu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam usaha mencapai keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk memacu peningkatan pemerataan pembangunan guna mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Kuncoro (2003:01) menyatakan bahwa:

Ciri yang paling mencolok dari aktivitas ekonomi secara geografis adalah konsentrasi dan ketimpangan. Ini berarti bahwa terdapat wilayah yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang relatif tinggi sementara wilayah lainnya relatif tertinggal. Tinggi rendahnya kesenjangan pembangunan antar wilayah ini dapat berpengaruh pada kemampuan menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Terciptanya lapangan pekerjaan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan secara terus menerus. Kunci keberhasilan suatu pembangunan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Meningkatkan taraf hidup, secara tidak langsung mengandung arti bahwa pemerintah harus mempersiapkan serangkaian program sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kualitas yang lebih baik. Pemerintah harus mampu membangun suatu kondisi yang mendorong intensitas kegiatan ekonomi yang lebih tinggi sehingga akan memperbesar penciptaan lapangan pekerjaan dan mempertinggi tingkat pendapatan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya pembangunan suatu daerah adalah pengembangan ketenagakerjaan. Upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi output suatu daerah. Pengembangan ketenagakerjaan merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam setiap pembangunan.

Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1.1
Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013
(dalam satuan orang)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab. Sambas	281.735	247.172	243.682	250.333	239.044	252.393
Kab. Bengkayang	98.531	101.425	107.244	104.394	107.894	103.897
Kab. Landak	163.713	155.545	166.984	154.709	453.836	218.957
Kab. Sanggau	220.252	208.039	211.152	207.653	206.249	210.065
Kab. Ketapang	205.242	201.116	213.042	210.621	189.678	203.989
Kab. Sintang	201.818	187.981	183.647	198.331	189.537	192.262
Kab. Kapuas Hulu	124.223	119.142	117.053	114.458	111.252	117.225
Kab. Sekadau	97.657	94.625	94.365	98.276	95.866	96.175
Kab. Melawi	98.168	96.087	91.824	95.957	92.919	94.991
Kota Pontianak	239.183	240.576	232.118	231.801	234.840	235.703
Kab. Kayong Utara	46.222	44.005	47.926	43.175	44.009	45.067
Kab. Kubu Raya	239.108	222.405	242.131	214.083	202.320	224.009
Kab. Pontianak	105.482	99.501	115.073	105.991	94.279	104.065
Kota Singkawang	79.651	78.059	80.332	77.733	83.111	79.775

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2009-2013

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja terendah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu Kabupaten Kayong Utara dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 45.067 orang, Kota Singkawang sebesar 79.775 orang, Selanjutnya Kabupaten Melawi sebesar 94.991 orang. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kayong Utara karena dapat dilihat dari segi infrastruktur dan fasilitas di Kabupaten Kayong Utara masih kurang memadai misalnya akses jalan raya yang belum memadai, listrik yang belum cukup serta penggunaan air bersih yang belum cukup memadai

sehingga para investor asing maupun investor dalam negeri masih belum mau untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Melawi sehingga kesempatan kerja yang ada di kabupaten Melawi masih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya.

Rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu Kabupaten Sambas dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 252.393 orang, Kota Pontianak sebesar 235.703 orang, Kabupaten Landak sebesar 218.957 orang, dan Kabupaten Sanggau sebesar 210.065 orang. Penyerapan tertinggi terdapat di Kabupaten Sambas hal ini karena pemerintah kabupaten Sambas membuka pemberdayaan lingkungan dengan adanya pelatihan keterampilan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas guna dapat membuka lapangan pekerjaan mikro bagi penduduknya. Misalnya dalam industri tambak perikanan.

Masalah ketenagakerjaan tidak dapat berdiri sendiri, baik secara regional maupun secara sektoral, tetapi berhubungan erat dengan masalah investasi baik itu investasi pemerintah maupun investasi swasta. Tumbuhnya perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri dengan masyarakat yang semakin kompleks. Peran pemerintah menjadi sangat penting, karena harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Menurut Mangkoesoebroto (1997:2) peran pemerintah sangat penting dalam menstabilkan perekonomian negara karena pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Peran pemerintah selalu meningkat hampir di semua sistem perekonomian suatu daerah. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dengan semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap belanja modal yang semakin meningkat dan bagaimana menarik minat investor untuk berinvestasi terutama investasi dari pihak swasta.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat mempertinggi intensitas kegiatan perekonomian. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja modal dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin bertambah yang berarti tingkat pengangguran akan menurun. Dengan demikian, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, pada akhirnya akan menuju pada kenaikan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berperan sebagai injeksi dana dalam perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Semakin banyaknya investor yang akan berinvestasi maka akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan beragam sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran pihak swasta juga sangat besar dalam mengangkat perekonomian suatu daerah. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) membutuhkan iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi yang

kondusif juga akan sangat berpengaruh, karena keadaan dan situasi investasi disuatu daerah dimana para pelaku ekonomi (pemerintah, swasta, dan asing) akan cenderung mudah merealisasikan rencana investasinya di suatu daerah dengan baik.

Untuk meningkatkan output maka dana yang dibutuhkan dari investasi juga semakin besar. Seperti diketahui bahwa investasi bersumber dari pemerintah dan swasta. Dimana investasi swasta dibedakan menjadi PMDN dan PMA. Kekurangan penyerapan tenaga kerja dari pemerintah diharapkan dapat terbantu melalui dana investasi swasta baik PMDN maupun PMA. Perkembangan belanja modal di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (dalam ribu rupiah)
Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Kab. Sambas	144.468.986	92.367.893	117.511.592	195.711.633	265.710.150	113.605.506
Kab. Bengkayang	141.524.489	63.444.064	119.101.966	109.494.671	146.607.171	116.034.472
Kab. Landak	180.134.449	128.117.048	139.073.845	220.740.546	284.541.140	190.521.406
Kab. Sanggau	99.944.441	90.240.739	127.466.681	233.644.094	237.410.055	157.741.227
Kab. Ketapang	322.161.023	190.487.041	277.364.524	335.423.818	335.423.818	292.172.044
Kab. Sintang	131.194.239	77.102.071	122.892.481	166.030.790	155.097.342	130.463.381
Kab. Kapuas Hulu	175.883.534	211.358.037	244.497.540	271.045.534	295.954.023	239.747.734
Kab. Sekadau	152.003.294	119.584.895	127.816.960	117.679.198	121.645.286	127.745.926
Kab. Melawi	174.593.164	126.054.360	123.989.511	194.169.415	197.321.087	163.225.507
Kota Pontianak	185.974.402	191.653.964	159.332.194	202.434.809	287.452.613	205.369.596
Kab. Kayong Utara	137.796.558	185.081.256	128.129.402	150.201.445	142.864.921	148.808.916
Kab. Kubu Raya	114.236.250	114.236.250	208.933.499	227.294.686	227.294.686	178.399.068
Kab. Pontianak	105.932.717	104.767.959	122.886.628	144.729.238	143.974.747	124.457.657
Kota Singkawang	168.207.116	152.456.247	116.784.605	116.209.082	121.861.231	135.103.456

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat dan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, 2009-2013.

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa belanja modal yang paling rendah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yaitu Kabupaten Sambas dengan rata-rata belanja modal sebesar Rp. 113.605.506, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 116.034.472, Kabupaten Pontianak sebesar Rp.124.457.657, selanjutnya Kabupaten Sekadau sebesar Rp.127.745.926.

Sedangkan rata-rata belanja modal tertinggi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu Kabupaten Ketapang dengan rata-rata belanja modal sebesar Rp. 292.171.044, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 239.747.734 dan Kota Pontianak sebesar Rp. 205.369.596. Rata-rata belanja modal tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang hal ini disebabkan karena dilihat dari kondisi wilayah yang relatif luas dengan jumlah penduduk yang banyak maka pemerintah Kabupaten Ketapang mengalokasikan belanja modal yang relatif besar karena masih membutuhkan sarana dan prasarana khususnya infrastruktur di sektor transportasi, pendidikan, maupun kesehatan.

Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Untuk itu peran investasi swasta sangat diperlukan dalam menunjang proses pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah karena peran pemerintah bukan satu-satunya sumber dari pertumbuhan ekonomi. investasi swasta memainkan peran penting dalam pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Beberapa ekonom berpendapat bahwa tabungan domestik swasta merupakan sumber dana kedua sesudah tabungan pemerintah dalam pembiayaan investasi. Namun, menurut Arsyad (2004:148),

terdapat banyak bukti bahwa tabungan investasi swasta memainkan peran utama dalam menunjang pembentukan modal.

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa rata-rata investasi swasta paling tertinggi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 2.376.796, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.134.407, Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 2.123.275, dan Kabupaten Sintang sebesar Rp. 1.725.434

Rata-rata investasi swasta terendah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu Tiga Kabupaten yang tidak memiliki investasi swasta yaitu Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, dan Kota Singkawang . Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, harus dirancang untuk perbaikan sistem agar dapat menarik para investor ke daerah Kabupaten Melawi sehingga daya dorong terhadap penyerapan tenaga kerja, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

Tabel 1.3
Perkembangan Investasi Swasta Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013 (Juta/Rupiah)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	rata-rata
Kab. Sambas	7.611	36.276	46.076	56.076	228.797	74.967
Kab. Bengkayang	40.202	39.814	39.814	39.814	117.472	55.423
Kab. Landak	101.918	113.021	132.170	148.955	169.107	133.034
Kab. Sanggau	1.505.677	1.586.341	1.758.182	2.185.933	2.353.135	1.877.854
Kab. Ketapang	733.620	813.706	1.153.117	1.414.969	2.023.436	1.227.769
kab. Sintang	1.270.020	1.381.810	1.434.932	1.577.382	1.645.183	1.461.865
Kab. Kapuas Hulu	50.000	127.822	197.946	537.175	1.425.960	467.781
kab. Sekadau	37.035	37.040	37.040	37.040	37.092	37.05
Kab. Melawi	930	1.285	1.285	4.485	4.485	2.494
kota Pontianak	187.068	168.335	191.291	221.428	219.397	197.504
Kab. Kayong Utara	0	0	0	0	0	0
Kab. Kubu Raya	7.131	0	0	7.411	9.321	1.551
Kab. Pontianak	0	0	0	0	0	0
Kota Singkawang	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2013

Adanya investasi dari pemerintah maupun investasi swasta akan memperbesar kapasitas ekonomi sehingga dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi dan memperbesar kesempatan kerja. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2 Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 sampai 2013 ?
2. Apakah investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 sampai 2013 ?
3. Apakah belanja modal dan investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai sumber informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan bagaimana menciptakan kesempatan kerja baru untuk mengantisipasi peningkatan angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

2. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti masalah yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja di masa depan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian dibidang ekonomi makro yang terkait dengan belanja modal, investasi swasta, dan penyerapan tenaga kerja.